ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010-2015 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ELIS SUSANTI
NPM. 1351010030

Jurusan : Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H / 2017 M

ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010-2015 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ELIS SUSANTI
NPM. 1351010030

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Drs. Nasruddin, M.Ag

Pembimbing II : Vitria Susanti, S.E., M.Ec.Dev

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H / 2017 M

ABSTRAK

Pembangunan manusia di Provinsi Lampung selama periode 2010-2015 mengalami peningkatan begitu juga dengan pembangunan manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dapat dilihat bahwa kota Metro selama lima tahun terakhir tercatat sebagai kota dengan IPM tertinggi, pada tahun 2015 telah mencapai 75,10. Sementara Kabupaten Way Kanan menempati posisi terendah ke lima dibandingkan dengan Kabupaten yang lainnya di Provinsi Lampung.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2015? Dan Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesejahteraan Masyarakat? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2015. Untuk Mengetahui Perspektif Ekonomi Islam tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier sederhana. Data di dapatkan dari data sekunder yang di terbitkan oleh badan pusat statistik pada tahun 2010-2015.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Way Kanan hal ini di tandai dengan nilai probabilitas (0,0000). Dengan nilai koefisien positif (1.644119) yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen pada PDRB, maka kesejahteraan akan meningkat sebesar 1,644119 persen dengan asumsi variabel lain tetap, atau ringkasnya apabila PDRB meningkat maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Ekonomi islam memandang bahwa kesejahteraan (falah) adalah sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan. Karena kesejahteraan yang berarti selamat sentosa, aman dan damai merupakan misi kerasulan nabi Muhammad SAW. Dalam islam juga IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak menjadi tanggung jawab Negara untuk menanganinya, dan termasuk kategori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh Negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Way Kanan di pengaruhi secara positif dan signifikan oleh PDRB yang bertambah setiap tahunnya. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk pengaturan antara pendapatan dan pengeluaran yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri maka pemerintah kabupaten Way Kanan harus dapat lebih mengelola sumber daya dan sumber pembiayaan yang diperoleh dari PDRB Kabupaten Way Kanan guna lebih produktif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi agar menjadi lebih baik.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudari:

Nama	: **Elis Susanti**
NPM	: **1351010030**
Jurusan	: **Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi	: **ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010-2015 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 20 Juli 2017

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Drs. Nasruddin, M.Ag	**Vitria Susanti, S.E., M.Ec.Dev**
NIP.195809241990031003	**NIP. 197809182005012005**

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Madnasir. S.E.,M.S.I
NIP. 197504242002121001

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010-2015 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.** Oleh: **ELIS SUSANTI,** NPM. **1351010030,** Jurusan: **EKONOMI SYARIAH,** telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Senin, 31 Juli 2017.

TIM PENGUJI

Ketua siding : **Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I** (.....)

Sekretaris : **Diah Mukminatul Hasyimi, M.E.Sy** (.....)

Penguji I : **A. Zuliansyah, S.Si.,M.M** (.....)

Penguji II : **Drs. Nasruddin, M.Ag** (.....)

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh. Bahruddin, M.A
NIP. 195808241989031003

MOTTO

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Q.S Al-Anbiyaa' 107)[1]

[1]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet.* Ke-10, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, AyahkuWahyono dan Ibuku Jamilah, Terimakasih telah memberikan segalanya untukku selama ini, yang telah menyayangiku dan mencintaiku serta membesarkanku sampai detik ini. Aku sangat bersyukur menjadi anakmu berada diantara kalian, terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, bimbingan, dukungan, motivasi serta do'a kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkanku disetiap waktuku menuntut ilmu.
2. Untuk adik ku tersayang Syahrul Mustofa terimakasih sudah selalu mendukungku dan memberi semangat untuk menyelesaikan tugas skripsiku.
3. Teman-teman seperjuangan ku di EI.B dan seluruh teman-teman seperjuangan ku di Ekonomi Syariah angkatan 2013, yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
4. Sahabat-sahabatku tersayang Izhartati, Evita Meilani, Linda Susanti, Endah Suryani, Asra Putri Mustika yang selalu memotivasi, memberikan dukungan, semangat, kecerian untuk selalu mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai. Serta teman-teman KKN (Reni, Laela, Indah, Suwaibah, Tohiroh, Sahal, Sariyanto, Ahmad, Dwi, Irfan, Heri) terimakasih yang telah memberikan semangat,dan selalu memberikan dukungan. Semoga kita semua sukses dan dapat mencapai semua cita-cita.

5. Untuk Almamaterku tercinta.
6. Untuk teman bermainku Nobi Adiansyah terimaksih telah memberikan semangat, kekuatan yang tak henti-hentinya untuk menyelesaikan tugas skripsiku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Elis Susanti dilahirkan pada tanggal 1 Mei 1995 di Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Wahyono dan Ibu Jamilah.

Penulis mulai menjalani pendidikan formal di SD N 1 Subing Karya pada Tahun 2001 dan lulus Tahun 2006.Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Ma'Arif Uman Agung dan lulus pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya ke SMK YPI Seputih Mataram. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan yang kemudian berganti nama menjadiUniversitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tanggal 7 April 2017 dengan mengambil Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2013.

Pada tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Kota Gajah, Desa Purworejo selama 40 hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala puji milik Allah SWT semata, karena banyak dengan izin dari kehendak-Nya semata maka penulis dapat menyelesikan skripsi ini yang berjudul "**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010-2015 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Madnasir, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan mahasiswanya dalam pengajaran yang baik.
3. Drs. Nasruddin, M.Ag. Selaku Pembimbing I yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. Vitria Susanti, S.E., M.Ec.,Dev. Selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan memberi masukan-masukan serta motivasi kepada penulis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang Insya Allah dapat penulis manfaatkan dalam kehidupan. Serta seluruh karyawan-karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan referensi-referensi bagi penulisan skripsi ini.
6. Sahabatku di Jurusan Ekonomi Syariah (Iis, Evita, Endah, Linda, Asra, Dicky) terimakasih untuk semua kebersamaan, perdebatan, dan pendewasaan yang telah kalian berikan. Serta sahabatku pada saat KKN hingga sekarang (Reni, Laela, Indah, Suwaibah, Tohiroh, Sahal, Sariyanto, Ahmad, Dwi, Irfan, Heri) terimakasih telah memberikan semangat.
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2013 dan teman-teman kelas A, B, C, D, E, dan F beserta kakak dan adik tingkat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya.Semoga karya penulis ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Juli 2017

Elis Susanti
NPM. 351010030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
RIWAYATHIDUP ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 3
C. Latar Belakang Masalah 3
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 15
   1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 15
   2. Pendekatan Penghitungan PDRB 15
   3. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam 18
B. Kesejahteraan Masyarakat 20
   1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 20
   2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 24
   3. Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat 39
   4. IPM Sebagai Indikator Kesejahteraan Masyarakat 42
   5. Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam 45
C. Hubungan Antar Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 53
D. Penelitian Terdahulu 54
E. Kerangka Pemikiran 60

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 63
   1. Jenis Penelitian 63
   2. Sifat Penelitian 63
B. Sumber Data 64
C. Metode Pengumpulan Data 64
D. Populasi dan Sampel 65

E. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel 66
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 68
G. Hipotesis Penelitan 71

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 73
B. Hasil Penelitian 78
   1. Statistik Deskriptif 78
   2. Uji Normalitas 89
   3. Uji Hipotesis 90
C. Pembahasan 93
   1. Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 93
   2. Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi 96

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 103
B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2010-2015 5
2. PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Ribu Rp.) 2010-2015 9
3. Definisi Operasional Variabel 67
4. PDRB Periode 2006-2015 78
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Periode 2006-2015 80
6. Uji Normalitas 81
7. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana 82
8. Uji t Nilai t-statistik 83
9. Uji R^2 Nilai R^2 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan intisari dari sebuah skripsi oleh karena itu sebelum penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul **"ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010-2015 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Kabupaten Way Kanan)".**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul di atas maka penulis akan menjelaskan beberapa kata sebagai berikut:

Analisis merupakan "penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[1] Dapat pula diartikan sebagai tinjauan, ulasan atau pembahasan".[2]

Pengaruh adalah "akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel lain".[3]

Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) adalah "hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi seluruh kegiatan

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 43

[2] Peter Saim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 691

[3] Sugiono, *Penelitian Administratif*, (Bandung, Alfabeta, 2001), h. 7.

ekonomi dalam batas wilayah suatu daerah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). PDRB lazim disajikan menurut lapangan usaha (sektoral) dan menurut komponen penggunaan, masing-masing atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000".[4]

Kesejahteraan Masyarakat adalah "suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat".[5]

Perspektif adalah "sudut pandang; pandangan".[6] konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spesial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.

Ekonomi Islam adalah "sebagai satu sistem ekonomi yang menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang bersumber pada ajaran syar'i dalam berekonomi".[7]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk membahas lebih dalam mengenai Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2015 Perspektif Ekonomi Islam.

---

[4] BPS.go.id

[5] Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012), h. 146.

[6] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 864.

[7] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2013), h. 69.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

   Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB suatu kabupaten/kota. Penggunaan PDRB sebagai variabel independen yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat dikarenakan angka PDRB dapat menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu wilayah tanpa memandang tingkat pendapatan tiap-tiap golongan, sehingga PDRB berlaku secara menyeluruh. Dalam teori dijelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mempengaruhi tingkat Kesejahteraan Masyarakat, maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

2. Alasan Subjektif

   Peneliti melakukan penelitian ini masih banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti sehingga mempermudah peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis jalani pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan

distribusi pendapatan yang merata. Strategi pembangunan ekonomi merupakan unsur penting dalam melaksanakan pembangunan yang seutuhnya, pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan lahir. Namun lebih dari itu, pembangunan pada semua aspek kehidupan yang diiringi dengan keserasian dan keseimbangan, sehingga usaha pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika hasil-hasil pembangunan berupa keadilan dan kesejahteraan mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali penduduk miskin sekalipun.[8]

Tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan ekonomi, memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; dan 3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.[9] Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja sehinggga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak.[10]

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita).[11] Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, *United Nations*

---

[8] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit*, h. 141.

[9] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010, Jakarta: BPS.

[10] Rini Sulistiawati, "*Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia*" Jurnal EKSOS ISSN 1693-9093 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Vol. 8 No.3, 2012. H. 196.

[11] Wiratno Agus Suryono,"*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah*" Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2010, h. 18.

Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau Negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (pendapatan) ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara.[12]

Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kualitas manusia dalam suatu daerah yang berguna untuk memajukan daerah tersebut. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2010-2015 dapat ditunjukan pada:

---

[12] *United Nations Development Programme*, 1990, *Human Development Report 1990*, Jakarta: BPS.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lampung Barat	69.28	69.72	70.17	70.37	70.37	70.37
Tanggamus	71.31	71.83	72.32	72.66	72.66	72.66
Lampung Selatan	70.06	70.53	70.95	71.25	71.25	71.25
Lampung Timur	70.73	71.26	71.64	72.14	72.14	72.14
Lampung Tengah	70.74	71.29	71.81	72.30	72.30	72.30
Lampung Utara	70.36	70.81	71.28	71.70	71.70	71.70
Way Kanan	69.92	70.43	70.84	71.08	71.08	71.08
Tulang Bawang	70.34	70.96	71.6	71.86	71.86	71.86
Pesawaran	69.77	70.3	70.9	71.25	71.25	71.25
Pringsewu	71.97	72.37	72.8	73.22	73.22	73.22
Mesuji	67.49	67.98	68.3	68.79	68.79	68.79
Tulang Bawang Barat	68.98	69.32	69.62	70.38	70.38	70.38
Pesisir Barat	---	---	---	68.43	68.43	68.43
Bandar Lampung	71,11	72,04	72.88	73.93	74.34	74.81
Metro	71.37	72.23	72.86	74.27	74.98	75.10
Lampung	63.71	64.20	64.87	65.73	66.42	66.95

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2015.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pembangunan manusia di Provinsi Lampung selama periode 2010-2015 mengalami peningkatan begitu juga dengan pembangunan manusia di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dapat dilihat bahwa kota Metro selama lima tahun terakhir tercatat sebagai kota dengan IPM tertinggi, pada tahun 2015 telah mencapai 75,10. Kemudian berturut-turut di ikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 74,81, Kabupaten Pringsewu sebesar 73,22. Ketiga Kabupaten/Kota ini nilai IPM-nya di atas nilai IPM Lampung.

Sebaliknya Kabupaten Pesisir Barat, merupakan Kabupaten baru sejak tahun 2013 merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Memiliki IPM terendah sebesar 68,43. Kabupaten terendah kedua adalah Mesuji dengan angka IPM sebesar 68,79, kemudian terendah ketiga adalah Lampung Barat dengan angka IPM sebesar 70,37. Serta terendah keempat adalah Tulang Bawang Barat dengan angka IPM sebesar 70,38. Dan terendah terakhir yaitu kelima adalah Way Kanan dengan angka IPM sebesar 71,08.

Berdasarkan skala internasional, status pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tergolong ke dalam kelompok menengah atas (66 < IPM < 80), sehingga masih diperlukan komitmen dan kerja keras yang kuat dari penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dari penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup khususnya Kabupaten baru yaitu Pesisir Barat.

Selama periode 2010-2015, IPM disemua Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dengan kecepatan yang bervariasi. Ada sejumlah Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM secara cepat dan sebaliknya ada pula Kabupaten/Kota dengan peningkatan IPM relativ lambat. IPM setiap tahun dipengaruhi oleh naik turunnya komponen-komponen pembentukan IPM, yaitu

angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita.

Menurut kamus W.J.S Poerwadarminta, sejahtera diartikan sebagai keadaan "aman, sentosa, dan makmur".[13] Sehingga arti kesejahteraan meliputi kemanan, keselamatan dan kemakmuran. Adapun istilah rakyat (sosial) dalam arti sempit berkait dengan sektor pembangunan sosial atau pembangunan kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikatagorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan (kelompok yang berpotensi untuk menjadi orang miskin). Dalam hal ini, kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat pada umumnya menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, keterlantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila, dan kenakalan remaja. Sebagai konsekuesinya, pengertian kebijakan kesejahteran rakyat seringkali diartikan sebagai kegiatan amal atau bantuan publik yang dilakukan pemerintah bagi keluarga miskin dan anak-anak mereka; yang oleh para pakar ilmu sosial dihubungkan dengan kondisi "Indeks Pembangunan Manusia/*Human Development Index*", yaitu: tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat yang dilihat dari tiga indikator utama: tingkat harapan hidup (*expectation of life*), tingkat pendidikan (*literacy, education*), dan tingkat pendapatan (*income*).

[13] W.J.S. Poerwadarimta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, Mizan, Bandung, 1996, h. 126.

Data statistik sangat diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi makro suatu daerah secara lengkap, akurat dan berkesinambungan. Data statistik yang akurat dan pokok, dapat memberi gambaran tentang keadaan ekonomi makro regional adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mampu menggambarkan keadaan ekonomi makro dalam waktu satu tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan akan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Way Kanan, maka perlu dilakukan perhitungan/penyusunan publikasi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara terus menerus setiap tahun.

Tabel 1.2 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Ribu Rp.) 2010-2015

Kabupaten/kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lampung Barat	11.754,04	13.101,19	13.210,39	14.452,54	16.038,29	17.490,83
Tanggamus	12.002,80	13.277,10	14.913,74	16.133,24	17.986,36	19.905,37
Lampung Selatan	20.247,14	22.286,19	24.424,70	26.555,78	29.388,43	32.340,25
Lampung Timur	20.421,32	22.654,81	24.249,46	27.086,62	29.573,29	31.046,08
Lampung Tengah	24.787,54	27.544,16	30.038,35	32.584,36	36.152,17	39.377,01
Lampung Utara	17.374,83	19.372,81	20.969,47	22.768,76	25.554,09	27.901,29
Way Kanan	14.765,33	16.441,58	17.881,72	19.158,23	21.404,20	23.213,76
Tulang Bawang	24.472,86	26.922,56	28.753,15	31.745,87	35.258,67	39.631,62
Pesawaran	17.790.98	19.579,12	21.238,34	23.221,31	25.732,77	29.264,00
Pringsewu	12.951,52	14.327,91	15.696,97	17.027,82	19.211,78	20.905,44
Mesuji	23.241,43	25.817,68	28.024,13	30.251,79	34.031,78	37.260,48
Tulang Bawang Barat	19.289,31	21.537,20	23.648,79	25.563,76	28.237,50	30.647,31
Pesisir barat	--	--	16.436,26	17.664,66	19.689,96	22.200,67

Bandar Lampung	25.311,15	27.511,28	30.063,50	32.770,59	36.779,66	39.997,44
Metro	17.413,24	19.124,21	21.118,46	23.015,79	25.669,07	27.427,47
Provinsi Lampung	19.722,39	21.981,47	23.910,84	25.768,94	28.776,87	31.188,15

Sumber. BPS Provinsi Lampung, 2015.

Nilai PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dilihat dari 5 tahun berturut-turut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pendapatan perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku selama kurun waktu 2010-2015 Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung tetap menempati urutan pertama dalam penciptaan nilai tambah. Kontribusinya terus naik dari 25,31 persen tahun 2010 menjadi 39,99 persen tahun 2015. Urutan kedua di tempati oleh Kabupaten Lampung Barat yaitu 11,75 persen tahun 2010 dan 17,49 tahun 2015, kemudian urutan ketiga Kabupaten Taggamus yaitu 12,0 tahun 2010 dan 19,90 tahun 2015. Serta urutan keempat adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu 22,20 di tahun 2015. dan yang urutan terakhir rendah kelima Kabupaten Way Kanan yaitu 14,76 pada tahun 2010 dan 23,21tahun 2015. Sehingga penulis disini akan meneliti Kabupaten Way kanan karena Kabupaten tersebut merupakan urutan terendah kelima padahal dapat dilihat dalam kurun sepuluh tahun ini Kabupaten tersebut dalam semua sektor mengalami kenaikan namun masih belum bisa setara dengan Kabupaten yang lainnya.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Dengan begitu semakin tingginya nilai PDRB maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan struktur

ekonomi regional yang ideal melalui suatu mekanisme perencanaan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan agar keputusan yang diambil dapat mencapai sasaran yang optimal dan tepat waktu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam hal ini data statistik mempunyai peranan penting untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sekaligus untuk menentukan kebijaksanaan dimasa yang akan datang.

Dalam prinsip sistem ekonomi Islam secara khusus nilai-nilai ekonomi Islam bersumber dari Al-quran dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat. Sejahtera dalam Islam berarti selamat sentosa, aman dan damai. Dalam surah Al-quran dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya: "*dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Qs. Al-Anbiyaa: 107).*[14]

Dalam konsep Ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia,

[14] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet.* Ke-10, Jakarta: Darus Sunnah, 2011

menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta menigkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.[15]

Dalam meningkat kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ia mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hirarki kebutuhan individu dan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*Maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan ilmu tujuh dasar: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), intelek atau akal (*aql*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, "kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahah al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya".[16]

Berdasarkan fakta pada latar belakang maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2015 Perspektif Ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[15] M. Umar Chapra, *Thowards A Just Monetary System*, Ahli Bahasa Ikhwan Abidin Basri, Sistem Moneter Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 2-3.

[16] Adiwarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Cet. 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 62.

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2015?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesejahteraan Masyarakat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Untuk Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2015.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Ekonomi Islam tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak terutama dalam hal praktis dan teoritis

1. Manfaat Praktis

   Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan PDRB di Kabupaten Way Kanan sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan serta mampu memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana Pengaruh PDRB terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan

ekonomi, khususnya tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2015.

BAB II

LANDASAR TEORI

A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Menurut Todaro (1997), PDRB Per Kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok,. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan di daerah. (BPS), menjelaskan bahwa dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah maka akan diperoleh angka PDRB Per Kapita. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa.[17]

2. Metode Penghitungan PDRB

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

[17] Badan Pusat Statistik (BPS)

a. Pendekatan produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi Sembilan sektor atau lapangan usaha[18], yaitu :

1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2) Pertambangan dan penggalian
3) Industri pengolahan
4) Listrik, gas, dan air bersih
5) Bangunan dan kontruksi
6) Perdagangan, hotel dan restoran
7) Pengangkutan dan komunikasi
8) Jasa keuangan, Real estate (persewaan) dan jasa perusahaan
9) Jasa-jasa

b. Pendekatan pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, dari :

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
2) Konsumsi pemerintah

[18] Katalog bps, pdrb way kanan

3) Pembentukan modal tetap domestik bruto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
4) Perubahan stok
5) Ekspor netto (ekspor dikurangi impor)
6) Impor netto

c. Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB Sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor (lapangan usaha).

Untuk memudahkan pemakai data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu : PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Struktur PDRB suatu wilayah atas dasar harga berlaku. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan

jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu (disebut tahun dasar).

Mulai tahun 2005 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang didasarkan pada harga-harga pada tahun 2000. Karena menggunakan harga konstan (tetap), maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan rill dari kuantum produksi dan sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi rill dapat dihitung.

3. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Banyak ahli ekonomi yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan

dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.

Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam QS. Nuh 10-12 :

فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ﴿١٢﴾

Artinya: *"Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai".*[19]

Dijelaskan pula dalam firman Allah QS Al-A'raaf 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: *"Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".*[20]

---

[19] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet.* Ke-10, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.

[20] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet.* Ke-10, Jakarta: Darus Sunnah, 2011

Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhannya, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan. Ekonomi islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang terus-menerus dari faktor-faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Dalam islam, kesejahteraan tersebut dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dapat dialokasiakan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk.

B. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam membahas kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian kesejahteraan. Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarimta adalah aman, sentosa, dan makmur'.[21] Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kamus besar Bahasa Indonesia kesejahteraan yakni hal atau keadaan

[21] W.J.S. Poerwadarimta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia,* Mizan, Bandung, 1996, h. 126.

sejahtera; keamanan, keselamatan, dan ketentraman.[22] Dengan kata lain kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta memiliki pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan seseorang.

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Bab I ketentuan umum Pasal I angka 31 menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah "suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohaniah, baik dalam maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Sejahtera merupakan bentuk hasil dari sebuah pembangunan. Dimana keberhasilan suatu usaha pembangunan tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh dua unsur pokok yaitu unsur ekonomi dan unsur non-ekonomi :[23]

a. Faktor ekonomi yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam meliputi tanah dan kekayaan alam, seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal bahan baku produksi. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah penduudk dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar

[22] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011) h. 534.

[23] Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 358.

potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan besarnya produktivitas yang ada. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola bahan mentah yang tersedia pada alam. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengelola kekayaan.

b. Faktor non-ekonomi yakni mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku di suatu negara. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan penduduk yang terlampau cepet, lambatnya pembangunan di pedesaan dan kerusakan lingkungan.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.[24] Disisi lain pula terdapat pendapat bahwa kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya, serta kemampuan membaca penting bukan karena kepuasan yang dihasilkannya tetapi karena dengan membaca akan membentuk kepribadian. Makan penting bukan karena mengkonsumsi makanan tetapi karena makanan penting untuk kehidupan dan kesehatan.

[24] Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : UUP STIM YKPN, 2012), h. 145.

Memberikan hak suara penting bukan karena menaikkan kepuasan tetapi karena menghargai sistem politik (demokrasi).[25]

Kesejahteraan masyarakat juga bermakna kondisi dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi yang dapat tercermin dari keadaan rumah yang layak huni, kebutuhan sandang dan pangan yang tercukupi rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau serta berkualitas atau dimana individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batasan tertentu atau kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya.[26]

Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari pada lainnya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi namun berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya dan politik.[27] Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi dua yaitu[28] :

a. Kesejahteraan individu, merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara objektif. Pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang objektif adalah membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda misalnya, seseorang yang memiliki skala

[25] Ibid, h. 153.
[26] Mustafa Edwin Nasution, et.al. *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 102.
[27] Rudi Badrudin, 2012, *Op.Cit*. h. 146.
[28] *Ibid*

preferensi tertentu lebih memilih produk A dari pada produk B. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan orang tersebut lebih tinggi kalau memilih produk A daripada produk B.

b. Kesejahteraan sosial, merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.[29]

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Badan Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

---

[29] Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta : IDEA, 1998) h. 146.

Menurut Bintarto kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan[30] :

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti modal, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat diatasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal dan selanjutnya muncul pertanyaan bagaimana untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan.[31]

United Nations Development Programme (UNDP), mengartikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan

---

[30] Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989) h. 104

[31] Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi 9*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 118

masyarakat, seperti pilihan untuk sehat, berpendidikan dan kehidupan yang layak. Pembangunan manusia sebagai proses partisipatif dan dinamis.[32] Pembangunan manusia merupakan konsep yang sempurna dengan deskripsi pembangunan berkelanjutan.

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu Negara, yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi)
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga)
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita pertahun.

Undang-undang No. 10 Tahun 1992 memberikan batasan mengenai keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota, anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.[33] Berdasarkan pengertian tersebut, maka dikembangkan indikator yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan keluarga di Indonesia. Indikator tersebut sangat bermanfaat untuk memantau

---

[32] United Nations Development Programme, *Human Development Report 1990*, (New York: Oxford University Press, 1990)

[33] Prijono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), h. 120.

kondisi kesejahteraan keluarga di Indonesia dari waktu ke waktu. Dalam indikator tersebut, tingkat keluarga dibagi dalam 5 tahapan yaitu, tahap Pra Sejahtera, tahap Sejahtera I, tahap Sejahtera II, tahap Sejahtera III, dan tahap sejahtera III+ (Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, 1996).[34]

Pengklasifikasian Kepala Keluarga dilakukan menggunakan acuan indikator-indikator pemenuhan kebutuhan penduduk. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keluarga Pra Sejahtera

   Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan Keluarga Berencana. Secara operasional mereka tampak *tidak mampu* memenuhi salah satu indikator berikut ini[35]:

   1) Menjalankan ibadah sesuai dengan dengan agamanya
   2) Makan minimal dua kali sehari
   3) Pakaian lebih dari satu pasang
   4) Sebagian besar lantai rumahnya tidak dari tanah
   5) Jika sakit dibawa ke sarana kesehatan

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

   Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan,

[34] *Ibid,* h. 121.
[35] *Ibid*, h. 113.

interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak. Secara operasional mereka tidak mampu memenuhi salah satu indikator berikut[36] :

1) Menjalankan ibadah secara teratur
2) Minimal seminggu sekali makan daging/telur/ikan
3) Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun
4) Luas lantai rumah rata-rata 8m^2 per-anggota keluarga
5) Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun yang buta huruf latin
6) Semua anak berusia 5-15 tahun bersekolah
7) Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap
8) Dalam tiga bulan terakhir tidak sakit dan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahap I dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

1. Karena alasan ekonomi/keluarga miskin yaitu keluarga yang menurut kemampuan ekonominya lemah dan miskin. Keluarga-keluarga semacam ini mempunyai sifat seperti yang dalam indikator yang dikembangkan oleh BPS dan Bappenas, yaitu keluarga yang secara ekonomis memang miskin atau sangat miskin dan belum dapat menyediakan keperluan pokoknya dengan baik.

[36] *Ibid*, h. 114.

2. Karena alasan non-ekonomi yaitu keluarga yang kemiskinanya bukan karena pada harta/uang atau kemampuan untuk mendukung ekonomi keluarganya tetapi miskin kepeduliannya untuk mengubah hidupnya menjadi lebih sejahtera misalnya dalam hal partisipasi pembangunan dan kesehatan dengan membiarkan rumahnya masih berlantai tanah padahal sebenarnya mampu untuk memplester lantai rumahnya atau kalau anaknya sakit tidak dibawa/diperiksa ke puskesmas.[37]

c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga Sejahtera Tahap II adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi indikator sebagai berikut[38] :

1) Minimal seminggu sekali menyediakan lauk daging, telur
2) Satu tahun minimal mempunyai 1 stel pakaian baru
3) Luas rumah minimal $8m^2$ untuk setiap penghuni rumah
4) Anggota keluarga yang berusia 60 tahun kebawah bisa baca tulis latin
5) Anak umur 6-15 tahun bersekolah
6) Minimal salah satu anggota keluarga mempunyai penghasilan tetap
7) Dalam 3 bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat
8) Anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih usia pasangan subur memakai kontrasepsi
9) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur

[37] Rudi Badrudin, 2012, *Op.Cit.* h. 172

[38] Buku Kerja Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana, Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung, 1995.

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga Sejahtera Tahap III adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi indikator sebagai berikut :

1) Mempunyai tabungan keluarga
2) Minimal satu hari satu kali makan bersama yang digunakan untuk komunikasi antar keluarga
3) Salah satu anggota keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat
4) Minimal 6 bulan sekali mengadakan rekreasi bersama keluarga
5) Memperoleh informasi dari radio/TV/surat kabar
6) Mudah dalam memperoleh sarana transportasi
7) Ada upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Indikator Keluarga Sejahtera Tahap III Plus adalah sebagai berikut :

1) Aktif dalam memberikan sumbangan materiil secara rutin
2) Aktif sebagai pengurus dalam salah satu organisasi masyarakat

Dari indikator yang telah dipaparkan di atas, diperoleh pengklasifikasian tingkat perekonomian keluarga sebagai berikut :

1) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dasar Keluarga Sejahtera Tahap I yakni sandang, pangan, papan, kesehatan dan kebutuhan ibadahnya.

2) Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya minimal 1 sampai 5 indikator Keluarga Sejahtera Tahap I.

3) Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga Sejahtera Tahap II adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya dari keluarga Sejahtera Tahap I juga dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikolog yang tertera pada kriteria Keluarga Sejahtera Tahap II.

4) Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga Sejahtera Tahap III adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi seluruh Indikator Keluarga Sejahtera Tahap I, dan 1-9 indikator Keluarga Sejahtera Tahap II serta dapat memenuhi kriteria 1-7 Indikator Keluarga Sejahtera Tahap III.

5) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga Sejahtera Tahap III Plus adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Keluarga Sejahtera Tahap I, II, III serta aktif dalam memberikan sumbangan materiil secara aktif dan aktif sebagai pengurus dalam salah satu organisasi masyarakat seperti yang tertera pada indikator Keluarga Sejahtera Tahap III Plus.

Dari penjabaran dan pengklasifikasian di atas maka dapat disimpulkan indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein. Semakin besar tingkat gizi yang dikonsumsi menandakan semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga.
b. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk pengeluaran pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.[39]
c. Perumahan, dinyatakan degan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang dan air.
d. Pendidikan, mengenai pendidikan pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Menurut BPS (2009:10), Indeks pendidikan diawali oleh sektor pendidikan dan merupakan salah satu komponen yang mengindikasikan pembangunan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan merupakan manifestasi yang sangat jelas dari perbaikan kondisi hidup suatu masyarakat pada suatu daerah sehingga dengan pendidikan yang lebih baik akan mendorong perbaikan kondisi sektor-sektor lain. Karakteristik pendidikan ini diwakili oleh komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.[40] Pendidikan yang diperlukan menurut Philip H. Coombs seorang tipologi ekonomi pendidikan mencakup empat kelompok :
    1) Pendidikan umum dan pendidikan dasar, baca tulis, hitung dan pengetahuan elementer tentang sains dan lingkungan hidup yang oleh

[39] Sub Direktorat Analisis Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2008), h. 12
[40] Rudi Badrudin, 2012, *Op.Cit*, h. 159.

kebanyakan sekolah dasar dan menengah pada umumnya ingin dicapai.[41]

2) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dimaksudkan terutama untuk mendalami pegetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang berguna untuk memperbaiki kualitas kehidupan keluarga, termasuk kesehatan dan nutrisi, rumah sehat dan perawatan anak, membangun rumah dan perbaikannya, keluarga berencana, dam sebagainya.

3) Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat, dimaksudkan untuk memperkuat lembaga-lembaga kemasyarakatan baik lokal maupun nasional, koperasi, proyek-proyek kemasyarakatan dan yang serupa.

4) Pendidikan Keterampilan Kerja, dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan khusus yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang bermanfaat bagi usaha membina kehidupan. Program-program pendidikan yang efektif dan diatur dengan baik serta cocok untuk semua pekerjaan adalah sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan desa.

a. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, setidaknya bila anggota keluarga sakit dapat dibawa kepuskesmas.

b. Pendapatan dan Pengeluaran

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi

[41] Suryana, *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), h. 86.

sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran perkapita perbulan satu rumah tangga.[42] Pengeluaran yang besar akan seimbang apabila dibarengi dengan pendapatan yang tinggi, begitupun sebaliknya pendapatan yang rendah akan mengakibatkan pengeluaran yang rendah pula. Apabila tidak terdapat keseimbangan diantara keduanya ini berarti masyarakat tersebut masih tergolong keluarga yang belum sejahtera karena penghasilan yang didapatkan belum seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Biro Pusat Statistik Provinsi Lampung menerangkan bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah beberapa indikator yang menjadi ukuran, antara lain[43] :

1. Tingkat pendapatan keluarga

   Upah dan gaji yang biasa disebut dalam istilah asing wages andsalaries merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam membentuk produk nasional. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu :

   a. Tinggi (> Rp. 10.000.000)

   b. Sedang (Rp. 5.000.000)

   c. Rendah (< Rp. 5.000.000)

[42] Sub Direktorat Analisis Statistik. *Op.Cit*, h. 69.

[43] *Bappeda.lampungprov.go.id. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung*, 2012, di akses pada 22 November 2015.

2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan (pengeluaran/konsumsi)

Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluarana dapat dipaki sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu :

a. Tinggi (> Rp. 5.000.000)
b. Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
c. Rendah (< Rp. 1.000.000)

3. Tingkat pendidikan keluarga

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa karena menjadi

salah satu investasi bagi pembangunan dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Selain itu pendidikan memiliki peranan strategis sebagai motor penggerak kemajuan pembangunan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu mengatasi masalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berhubungan dengan pola pikir, tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan potensi alam yang ada. Profil pendidikan penduduk dapat dilihat dari gambaran umum tingkat pendidikan (formal) yang dicapai, ketersediaan sarana pendidikan serta partisipasi penduduk usia sekolah.

4. Tingkat kesehatan keluarga

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Dengan ketersediaan gizi baik dan seimbang akan mendukung kualitas kesehatan dalam kehidupan manusia. Pembangunan kesejahteraan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran umum mengenai sarana, tenaga kesehatan dan angka kesakitan masyarakat.[44]

Keadaan kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk suatu bangsa. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat

[44] Bappeda.lampungprov.go.id. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung* Tahun 2012.

ditunjukkan antara lain dari tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan, penolong persalinan dan status gizi balita.

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1995 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Keadaan dan kualitas serta fasilitas lingkungan perumahan memberikan sumbangan dalam kenyamanan hidup sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan tersebut diantaranya dapat terlihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, sumber penerangan dan fasilitas tempat buang air besar.

Sementara itu, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :

a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya

c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya
d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti modal, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

Di sisi lain, menerangkan kesejahteraan ada dua aspek yaitu :

a. Tingkat perkembangan fisik seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup dan sebagainya
b. Tingkat mentalnya, seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, integrasi dan kedudukan sosial (*social status*).

Sedangkan, menurut INKESRA (Indikator Kesejahteraan Rakyat), "menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang digunakan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat", antara lain :

a. Pendidikan
b. Ketenagakerjaan
c. Kesehatan
d. Fertilitas (kelahiran) dan Keluarga Berencana (KB)
e. Konsumsi dan Pengeluaran Keluarga

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

a. Faktor Intern Keluarga

1) Jumlah anggota keluarga

Pada zaman seperti sekarang ini tuntutan keluarga semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandan, pangan, papan, pendidikan, dan sarana pendidikan) tetapi kebutuhan lainya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi dan lingkungan yang serasi.

2) Tempat tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selerakeindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan serta menyejukkan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang menimbulkan kebosanan untuk menempatinya.

3) Keadaan sosial ekonomi keluarga

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi dari pada hubungan yang benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang nampak dengan adanya saling hormat menghormati, toleransi, bantu-membantu dan saling mempercayai.

4) Keadaan ekonomi keluarga

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Jadi semakin banyak sumber-sumber keuangan/pendapatan yang diterima maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.

b. Faktor Ekstern

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena hal ini dapat menggangu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan ketentraman batin anggota keluarga yang datangnya dari luar lingkungan keluarga antara lain :

1) Faktor manusia yaitu, iri hati dan fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma
2) Faktor alam bahaya alam, kerusuhan dan berbagai macam virus penyakit
3) Faktor ekonomi negara pendapatan setiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi
4) Faktor nilai hidup yaitu, sesuatu yang dianggap paling penting dalam hidupnya
5) Nilai hidup merupakan “Konsepsi”, artinya gambaran mental yang membedakan individual atau kelompok dalam rangka mencapai sesuatu yang diinginkan

6) Faktor tujuan hidup yaitu sesuatu yang akan dicapai atau sesuatu yang diperjuangkan agar nilai yang merupakan patokan dapat tercapai. Dengan demikian tujuan hidup tidak terlepas dari nilai hidup
7) Faktor standar hidup yaitu tingkatan hidup yang merupakan suatu patokan yang ingin dicapai dalam memenuhi kebutuhan.[45]

Hasil Survey Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan dari pada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain :

1) Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat
2) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat
3) Potensi regional (sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan
4) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.[46]

---

[45] Elkana Goro Leb,*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Sabu RaiJua Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL Universitas Nusa Cendana, 2013.

[46] Arifin Taslim, *Metode Kesejahteraan Masyarakat*, IPB, Bogor, 2004, h. 33

4. IPM sebagai Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator yang digunakan oleh para ilmuan sosial untuk mengukur kondisi kesejahteraan sosial cukup beragam. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu Negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau Negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yiatu : angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*), dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir, indikator daya beli mengukur standar hidup. BPS mengukur kesejahteraan masyarakat melalui delapan bidang, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan sosial lainnya.

Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut:

a. Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian pertahun

diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapat informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode *Brass*, varian *Trussel*). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat proses perhitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

b. Indeks Pendidikan

Perhitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduudk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehungga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka melek huruf), dimana angka melek huruf merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara

keseluruhan. Sedangkan cerminan angka rata-rata lama sekolah merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

c. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP Adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (Provinsi atau Kabupaten/Kota) tidak memakai PDRB Perkapita karena PDRB Per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concert IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar Provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari survi sosial ekonomi nasional (susenas) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity)*.

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Manusia seharusnya merupakan hakikat tujuan pembangunan, sulit dikatakan ada pembangunan bila kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih substansial.

Salah satu indikator yang popular untuk mengukur kinerja pembangunan manusia adalah HDI (*Human Development Index*) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencoba mengukur kinerja

pembangunan manusia dengan skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang rendah) hingga 1 (pembangunan manusia yang tertinggi).[47]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan yang dianggap cukup representativ dalam perencanaan pembangunan bagi pemerintah. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang mereflesikan upaya pembangunan manusia, artinya IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.[48]

5. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

a. Pengertian kesejahteraan (falah) dalam ekonomi islam

Falah berasal dari bahasa arab dari kata *qflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan, kemenangan, yaitu kemuliaan kemenangan dalam hidup.[49] *Falah*, kehidupan yang mulia dan ksejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat yang memberikan dampak yang disebut *maslahah. Maslahah* adalah segala bentuk keadaan baik matrial maupun non matrial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai mahluk yang paling mulia. Menurut As-Shabiti, *maslahah* dasar bagi kehidupan manusia

[47] Mudrajat Kuncoro, *Masalah Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 146.

[48] Bappeda.lampungprov.go.id. h. 31. Di Akses 10 Mei 2016

[49] Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 2

terdiri dari lima hal yaitu, agama *(dien)*, jiwa *(nafs)*, intelektual *('aql)*, keluarga dan keturunan *(nasl)* dan material *(aealth)*. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan diakhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.[50]

Sejahtera adalah aman, sentosa, makmur, damai dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.[51] Pengertian ini sejalan dengan pengertian islam yang berarti seamat sentosa, aman dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi islam itu sendiri. Misi itulah yang menjadi misi Rosulullah yang dinyatakan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiyaa' (21): 107

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya: *"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".*[52]

Dalam ekonomi islam, kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi

---

[50] *Ibid*, h. 6

[51] W.J.S. Poerwadarimta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan, 1996), h.126.

[52] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet.* Ke-10, Jakarta: Darus Sunnah, 2011

dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah kepada Nabi Adam as. Dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Thaha: 117-119)

فَقُلۡنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوۡجِكَ فَلَا يُخۡرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلۡجَنَّةِ فَتَشۡقَىٰٓ
١١٧ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعۡرَىٰ ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظۡمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضۡحَىٰ
١١٩

Artinya: *"Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka, 118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, 119. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".*[53]

Berdasarkan ayat ini jelas bahwa sandang, pangan, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan ini merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat.

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat yang diperoleh melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Jika faktor-faktor produksi tersebut dimanfaatkan secara optimal maka pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

[53] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet.* Ke-10, Jakarta: Darus Sunnah, 2011

Yusuf Qardhawi , mengungkapkan bahwa faktor produksi yang utama adalah alam dan kerja manusia produksi merupakan panduan harmonis antara alam dengan manusia.[54]

Sistem kesejahteraan masyarakat dalam islam bukan sekedar bantuan keuangan maupun bentuknya. Bantuan keuangan hanya merupakan satu dari sekian bentuk bantuan-bantuan yang dianjurkan islam. Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari:

1) Perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat seimbang. Masyarakat islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw, melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. Khadijah, Ali bin Abu Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain. Kemudian lahir diluar keluarga, dan demikian seterusnya. Sehingga pada akhirnya terbentuknya masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan masyarakat.[55]
2) Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan islam yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Tidak mungkin jiwa merasa tenang apabila kepribadian terpecah seperti yang terkandung dalam QS Az-Zummar ayat 29:

[54] Yusuf Qardhawi, Dlam Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Ekskutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000), h.109

[55] *Ibid*, h.133

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًاۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٩

Artinya : *"Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui".*[56]

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu[57]:

1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
2) Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk perilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu.
3) Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

[56] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet.* Ke-10, Jakarta: Darus Sunnah, 2011

[57] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.10

Agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder maupun tersier, dan pelengkap. Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencapai keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.[58]

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi islam memberikan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.[59]

Adapun menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.[60] Tujuan ekonomi islam menciptakan kehidupan manusia yang aman dan kesejahteraan. Sebagai tatanan ekonomi, islam menganjurkan manusia bekerja dan berusahan. Bekerja dan berusaha dilakukan oleh manusia diletakkan Allah pada timbangan kebaikan. Menurut Islam, yaitu senantiasa mengaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka

[58]*Ibid,* h.89

[59]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,), h.2-3

[60]*Ibid*, h.10

Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu *(syahwat),* dengan adanya hawa nafsu ini maka muncullah keinginan dalam diri manusia.

Dalam ekonomi Islam kebutuhan manusia *(Maqshid)* terdiri dari tiga jenjang:

1) *Dharuriyat* (Primer)

Merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok, yakni : agama, jiwa, akal, keturunan dan harga.[61] Pengabaian terhadap kelima unsur tersebut akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Tujuan yang bersifat dharuri merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu suruhan-suruhan syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan dharuri adalah "wajib" (menurut jumhur ulama) atau "fhardu" (menurut ulama Hanafiah). Sebaliknya, larangan Allah berkaitan dengan dharuri ini bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkannya termasuk haram dzati. Untuk mendukung pencapaian dari tujuan dharuri ini, syara' menetapkan hukum-hukum pelengkap yang terurai dalam kitab-kitab fiqh.

[61] Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1, Juni 2010 http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi ISSN (P): 1829-7382, h. 46

2) *Hajiyyat* (Sekunder)

Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya jenjang hajiyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang dharuriyat. Atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

3) *Tahsiniyyat* (Tersier)

Maksudnya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia.

Dalam Islam, ada kebijakan yang dinamakan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuh-kebutushan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara.

Pertama kali, Islam memandang tiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Baru, berikutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebuthan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Islam telah menjamin terpenuhinya hak hidup secara pribadi serta memberikan kesempatan kepada tiap orang tersebut untuk memperoleh kemakmuran hidupnya.

C. Hubungan Antar Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Per kapita terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

Menurut Midgley, menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial.[62] Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya 40 produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi

[62] James Midgley, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, (London : SAGE Publications Ltd, 1995).

pertumbuhan ekonomi.[63] Pembangunan manusia berdampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, karena peningkatan pembangunan manusia akan menghasilkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada masa yang akan datang.

D. Penelitian Terdahulu

Devani Ariestha Sari, dalam penelitiannya tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung menggunakan beberapa variabel yaitu Produk Dmestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X2), Jumlah Penduduk Miskin (X3) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Bandar Lampung (Y). Dan menggunakan alat Analisis Regresi Linier Berganda. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai koefisien regresi PDRB Per Kapita adalah sebesar 10,68152 dengan probabilitas sebesar 0,0008 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandarlampung. Nilai koefisien regresi jumlah penduduk miskin sebesar -2,022665 dengan probabilitas sebesar 0,0203 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandarlampung.[64]

---

[63] Aloysius Gunadi Brata, *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya, 2004), h.

[64] Devani Ariestha Sari, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung*, Skripsi Ekonomi Pembangunan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 2016.

Hadi sasana, dalam penelitiannya tentang Peran disentralisasi fiscal terhadap kinerja ekonomi kabupaten/kota provinsi jawa tengah menggunakan beberapa variabel yaitu Disentralisasi fiscal (X1), Pertumbuhan ekonomi (Y1), Tenaga kerja terserap (Y2), Penduduk Miskin (Y3), Kesejahteraan masyarakat (Y4). Dan menggunakan alat Analisis jalur (path analysis) yang dikembangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis, Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah.[65]

Hendarmin, dalam penelitiannya tentang Pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi,

[65] Hadi Sasana, *Peran Disentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No. 1, Juni 2009, hal. 103-124.

kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota provinsi Kalimantan barat menggunakan variabel Belanjan modal pemerintah daerah (X1), investasi swasta (X2), Pertumbuhan Ekonomi (Y1), Kesempatan kerja (Y2), Kesejahteraan masyarakat (Y3). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Terhadap pertumbuhan ekonomi, hanya variabel investasi swasta yang memiliki pengaruh signifikan namun koefesiensinya berslope negative(bertolak belakang dengan teori ekonomi). Terhadap kesempatan kerja, hanya variabel belanja modal yang memiliki pengaruh signifikan dan memiliki koefisien yang positif (sesuai teori); sementara variabel investasi swasta walaupun memiliki slope positif (sesuai teori) namun tidak signifikan. Terhadap kesejahteraan masyarakat, pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta melalui jalur pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, kedua variabel pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, namun slope dari pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang negatif (tidak sesuai teori). Secara umum, untuk meningkatkan kesejahteraan di Kalimantan Barat jalur yang dapat digunakan adalah peningkatan belanja modal pemerintah daerah sehingga dapat memperluas kesempatan kerja, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[66]

Whisnu Adhu Saputra, dalam penelitiannya tentang Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, Penganguran terhadap tingkat kemiskinan di

[66] Hendarmin, *Pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota provinsi Kalimantan barat*, Jurnal ISSN 1693-9093 Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012, hal 144-155.

kabupaten/kota Jawa Tengah. Menggunakan variabel Jumlah penduduk (X1), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X3), Tingkat Pengangguran (X4), Kemiskinan (Y). dalam penelitiannya menunjukkan Dari berbagai variabel mempunya pengaruh signifikan atau mempunyai hubungan yang positif serta negative terhadap kemiskinan di jawa tengah.[67]

Agus Sulaksono, dalam penelitiannya tentang Pengaruh Produksi Batubara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Era Otonomi Daerah di Indonesia menggunakan variabel serta alat analisis yaitu Adapun alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis linier berganda yaitu sebagai variabel independen produksi batubara (X) dan sebagai variabel dependen PDRB (Y2) dan kesejahteraan masyarakat (Y1). Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Produksi batubara berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. 2. Produksi batubara berpengaruh positif terhadap PDRB sector pertambangan di Indonesia.[68]

Amirus Sodiq, dalam Penelitiannya tentang Konsep Kesejahteraan Dalam Islam menunjukkan kesimpulan bahwa Aspek-aspek yang sering dijadikan sebagai indicator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan social budaya. Tetapi mengapa sebagian orang yang sudah

---

[67] Whisnu Adhi Saputra, *Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, Penganguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah*, Skripsi untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro Semarang 2011.

[68] Agus Sulaksono, *Pengaruh Produksi Batubara Terhadap Ekonomi Dan Kesejahteraan*, Jurnal.

memiliki rumah mewah, kendaraan, deposito dan berbagai bentuk kekayaan lainnya justru merasa gelisah, tidak tenang, ketakutan, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdasarkan fakta di atas, rasanya ada yang kurang dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan hidup justru diberikan oleh Allah Swt. kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang mau melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah Swt. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Swt. Dalam Surat An-nahl ayat 97, sedangkan tiga indicator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan, sebagaimana yang disebutkan Allah Swt. Dalam Surat Quraisy ayat 3-4.[69]

Agus Suryono, dalam Penelitiannya tentang Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat yang menyatakan bahwa rumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dapat diartikan sebagai suatu sistem kebijakan pemerintah yang terorganisasi dari pelayananpelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu dan mendorong individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat agar dapat mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang maksimal (memuaskan). Dengan maksud agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberikan kesempatan kepada individuindividu untuk mengembangkan kemampuankemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkannya.

[69] Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.*

Untuk itu perlu di identifikasi tiga elemen pokok, yaitu: (1) sejauhmana masalah-masalah sosial ini diatur; (2) sejauhmana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, dan; (3) sejauhmana kesempatan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dapat disediakan atau di fasilitasi.[70]

Prima Sukmaraga (2011), dalam penelitiannya tentang Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa setiap variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.[71]

Dio Syahrullah, dalam Penelitiannya tentang Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten tahun 2009-2012 yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan dan negative terhadap kemiskinan di Provinsi Banten dengan tingkat keyakinan 95 persen hal ini ditandai dengan nilai probabilitas (0,0102). Pendidikan tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Banten hal ini ditandai dengan nili probabilitas (0,9924). Pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di provinsi banten dengan tingkat keyakinan 95 peren hal ini di tndai dengan nilai probabilitas (0,0006). Secara bersama-sama (simultan) variabel PDRB,

[70] Agus Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi ISSN 2085-1162 Volume VI, Nomor 02, September 2014.

[71] Prima Sukmaraga, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro Semarang 2011.

Pendidikan dan Pengangguran berpengaruh erhadap kemiskinan di Provinsi Banten pada periode 2009-2012.[72]

Tunjung Hapsari 2011, dalam penelitiannya tentang Pengaruh Insfrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, dalam tulisannya ini menyatakan bahwa seluruh variabel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.[73]

E. Kerangka Pemikiran

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga Negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Akibatnya, masih ada warga Negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.[74]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yaitu derajat

---

[72] Dio Syahrullah, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten tahun 2009-2012*, Skripsi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

[73] Tunjung Hapsari, *Pengaruh Insfrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Skripsi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

[74] Gregorius Batafor, *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata – Provinsi NTT*, Tesis Pascasarjana Universitas Udayana, 2009.

perkembangan manusia, kemudian perlu ditambahkan bahwa nilai IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Kualitas hidup tercermin dari pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang dilihat dari tingkat pendapatan.[75] Angka IPM Kabupaten Way Kanan lebih rendah ke lima jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten yang lainnya yang sudah tinggi, itu berarti kualitas masyarakatnya juga masih kurang baik.

Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan disentralisasi fiscal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia.[76] Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita berdasarkan harga berlaku, yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah.[77]

---

[75] Chalid, Nursiah dan Yusbar Yusuf, *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*, (Jurnal Ekonomi Universitas Riau, 2014)

[76] Mirza, Denni Sulistio, *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap IPM Jawa Tengah* (Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2011).

[77] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, *Analisis Statistik Perencanaan Pembangunan*, (Way Kanan, Lampung, 2011).

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) dapat dilihat pada gambar berikut :

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya didominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.[78]

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (Kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai tingkat pengangguran.[79] Penelitian ini menggali data yang bersumber dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan menuturkan pemecahan masalah sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, menganalisis serta menginterprestasikannya. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat

---

[78] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 97

[79] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 5

populasi atau daerah tertentu.[80] Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) dan dalam penggunaannya pada penelitian diatur dan diolah oleh penulis. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Way Kanan.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dengan mengutip literatur dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, data-data dari instansi pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

---

[80] Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial, dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 47

1. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa cacatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga berbentuk file yang tersimpan di sever serta data yang tersimpan di Website.[81] Data ini bersifat tidak terbatas ruang dan waktu. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.

2. Studi Pustaka

   Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literature terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, cacatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.[82]

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[83] Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh laporan data Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita dan data Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan.

---

[81] *Ibid*, h. 231

[82] Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), h. 157

[83] Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 20), h. 174

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.[84] Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut, dan apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sekaligus sehingga penelitiannya menjadi penelitian populasi.[85] Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel sepuluh tahun yaitu dari tahun 2006-2015.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.[86] Adapun alasan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah :

Data yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Way Kanan hanya tersedia di atas tahun 2000 dan di bawah tahun 2015.

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian.[87] Sesuai dengan judul yang ada maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :

[84] Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 131
[85] Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 134
[86] *Ibid*, h. 88.
[87] Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 151

1. **Variabel Penelitian**

   a. **Variabel Independen**

      Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).[88] Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

   b. **Variabel Dependen**

      Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.[89] Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Masyarakat.

2. **Definisi Operasional Variabel**

   Definisi operasional adalah variabel penelitian di maksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument serta sumber pengukuran berasal dari mana.[90]

   Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

   Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta memiliki pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan seseorang.

---

[88] Ibid, h. 4
[89] *Ibid*, h. 5
[90] Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, h. 77

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indicator	Ukuran	Sumber	Skala Pengukuran
PDRB (X)	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Way Kanan	PDRB Per Kapita	BPS	Rasio (Rp)
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan	IPM dalam (Persen)	BPS	Rasio (Persen)

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum dan kongkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.[91]

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari

[91] Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 42.

penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.

Alat uji analisis data menggunakan analisis Regresi Linier Sederhana, yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk keabsahan data maka digunakan uji normalitas dan uji hipotesis.

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), yakni pengaruh PDRB (X) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y). Pengujian dilakukan dengan asumsi adanya hubungan linier diantara variabel yang akan diteliti, meliputi uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Besarnya *alpha* yang digunakan adalah 5%.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot.[92]

Dasar pengambilan keputusan dengan grafik normal plot, yaitu:

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

[92] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21,* Cetakan ke VII, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 160.

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3. Alat Uji Hipotesis

1) Uji Parsial atau Uji (t)

Uji T ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen adalah pengaruh tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang merupakan variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program E-views Statistik Parametrik sebagai berikut:[93]

a) Jika Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima

b) Jika Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak

Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program E-views pada table *coefficients* kolom sig atau *significance*.

2) Koefesien Determinasi (R^2)

Koefesien determinasi (R^2) dari hasil regresi linier sederhana menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh

[93] Santoso Singgih, *Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 168

variabel bebasnya.[94] Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana maka variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial mempengaruhi variabel dependen yaitu profitabilitas yang dinyatakan dengan R^2 untuk menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel PDRB terhadap variabel Kesejahteraan masyarakat. Sedangkan r^2 untuk menyatakan koefisien determinasi parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Besarnya koefesien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, semakin mendekati nol, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sedangkan jika koefesien determinasi mendekati 1 maka, dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel terkait. Angka dari R square di dapat dari pengolahan data melalui program E-views yang biasa dilihat pada tabel model summery kolom R square.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

---

[94] *Ibid*, h. 167.

H0 = Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat

H1 = Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Way Kanan

Diawali pada tahun 1957, dengan di pimpin oleh Wedana Way Kanan, Ratu Pengadilan, diadakanlah pertemuan yang pertama kali guna membahas rencana Pemerintah Pusat yang memerlukan 100.000 hekar tanah untuk keperluan transmigrasi. Pada saat itu tiga kewedanaan yang ada, yaitu Kewedanaan Kotabumi, Kewedanaan Krui, dan Kewedanaan Menggala menolak rencana Pemerintah Pusat. Namun Kewedanaan Way Kanan menerima tawara itu dengan pertimbangan agar kelak Way Kanan dapat cepat ramai penduduknya. Pada saat itulah muncul gagasan awal yang dikemukakan oleh Hi. Ridwan Basyah selaku notulis dalam pertemuan tersebut, untuk menjadikan Way Kanan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri terpisah dari Kabupaten Lampung Utara.

Pada tahun 1971, keinginan untuk menjadikan Way Kanan menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri muncul kembali. Pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para ilmuan diselenggarakan dikediaman Hi. Ridwan Basyah di Tanjung Agung – Bandar Lampung.

Selanjutnya pada tahun 1975, bapak Nasrunsyah Gelar Sutan Mangkubumi, di Bumi Agung – kecamatan Bahuga melaksanakan acara adat Bugawi dengan mengundang tokoh-tokoh adat (penyimbang)

sewilayah Way Kanan. pada kesempatan itu diadakan musyawarah khusus yang di pimpin oleh Hi. Ridwan Basyah membahas kembali gagasan untuk menjadikan Way Kanan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri, sekaligus mengajukan usul kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Lampung.

Kemudian pada tahun 1986, Pemerintah Pusat membentuk Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Blambangan Umpu dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 821.26-502 Tanggal 8 Juni 1985, dengan Wilayah Pembantu Bupati Blambangan Umpu terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Blambangan Umpu dengan ibukota Blambangan Umpu
2. Kecamatan Bahuga dengan ibukota Mesir Ilir
3. Kecamatan Pakuon Ratu dengan ibukota Pakuon Ratu
4. Kecamatan Baradatu dengan ibukota Tiuh Balak
5. Kecamatan Banjit dengan ibukota Banjit
6. Kecamatan Kasui dengan ibukota Kasui

Berdasarkan surat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat I Lampung, Nomor : 660/1990/II/1991 Tanggal 18 Februati 1991 yang ditujukan kepada Pembantu Bupati Wilayah Blambangan Umpu, maka Hi. Ridwan Basyah yang pada waktu itu menjabat sebagai Pembantu Bupati menyelenggarakan musyawarah besar (Mubes) dengan mengambil tempat di SESAT PURANTI GAWI Blambangan Umpu, pada tanggal 4 Mei 1991 dengan maksud untuk

mempersiapkan lahan perkantoran, nama kabupaten, dan letak ibukota kabupaten sebagai persiapan Way Kanan menjadi Kabupaten. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 200 orang, terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, ilmuan dan para pejabat. Dalam Mubes tersebut dibahas mengenai pemantapan usulan dan pernyataan dukungan sepenuhnya agar Way Kanan menjadi Kabupaten dengan ibukota di Blambangan Umpu dan terdiri dari 17 kecamatan. Usulan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, DPR-RI dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Lampung. Berdasarkan usulan tersebut, maka di adakanlah rapat-rapat di tingkat Provinsi, kabupaten dan DPR-RI. Kemudian di lanjutkan dengan kunjungan DPR-RI ke Blambangan Umpu.

Berkat perjuangan yang gigih oleh semua pihak dan dengan Ridho Allah SWT, maka pada tahun 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang-undang tersebut, maka pada tanggal 27 April 1999, Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Kabupaten Way Kanan dan sekaligus melantik Drs. Tamanuri sebagai pejabat Bupati Way Kanan. Tanggal 27 April 1999 inilah yang dijadikan sebagai tanggal kelahiran Kabupaten Way Kanan.

2. Geografi

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yang memiliki luas wilayah seluas 3.921,63 km^2 atau sebesar 11,11 persen dari luas Provinsi Lampung, dan di batasi oleh :

1. Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah Utara
2. Kabupaten Lampung Utara, di sebelah Selatan
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat, di sebelah Timur
4. Kabupaten Lampung Barat, di sebelah Barat

Ibu Kota Kabupaten Way Kanan adalah Blambangan Umpu yang merupakan salah satu kampong tua yang ada di Kabupaten Way Kanan. secara geografis, Kabupaten Way Kanan terletak pada posisi :

Timur – Barat, berada antara : $104,17^0$ – $105,04^0$ Bujur Timur

Utara – Selatan, berada antara : $4,12^0$ – $4,58^0$ Lintang Selatan

3. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Way Kanan dapat di bagi menjadi 2 (dua) unit topografis yaitu : daerah topografi berbukit sampai bergunung dan daerah River Basin

a. Topografi Berbukit Sampai Bergunung

Lereng-lereng yang curam atau terjal dengan ketnggian berfariasi antara 450-1500 m dari permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan yang umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder dengan puncak-puncaknya antara lain : Bukit Barisan dan Bukit Pesagi.

b. Daerah River Basin

Di Kabupaten Way Kanan terdapat river basin sungai-sungai kecil.

Pada umumnya bentuk medan topografi Kabupaten Way Kanan terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu :

- Sebelah barat lebih kurang 7 persen dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan, yang terdiri dari lereng-lereng yang curam atau terjal degan ketinggian bervariasi antara 450 – 1500 m dari permukaan laut, dan pada umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder.
- Sebelah Timur lebih kurang 93 persen dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan terbentang dataran yang sebagian besar tertutup vulkanis awan gelap dan terbentang sawah serta perkebunan dataran rendah.

4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2000 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 adalah sebanyak 349,8 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1990, di mana pada saat itu kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan masih merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara, maka pertumbuhan penduduknya relative rendah yaitu hanya sebesar 0,15 persen pertahun pada periode tahun 1990-2000.

Penduduk kabupaten Way Kanan pada tahun 2014 berdasarkan hasil Poyeksi tercatat sebanyak 428.097 jiwa, jika di bandingkan dengan tahun

2013 (423,195 jiwa) maka terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 4.902 jiwa atau dengan pertumbuhan sebesar 1,16 persen.

Kepadatan penduduk kabupaten Way Kanan tahun 2014 adalah sebesar 109 jiwa per km^2. Berdasarkan kecamatan di Kabupaten Way Kanan, maka kecamatan Baradatu memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 254 jiwa per km^2, sedangkan kecamatan Negeri Besar tercatat sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu sebesar 50 jiwa per km^2.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data yang diperoleh berdasarkan metode sampel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling.* Dari hasil olah data yang dilakukan dapat dijelaskan mengenai variabel-variabel yang terdapat pada model regresi linier sederhana. Data-data yang diperlukan dalam analisis ini diperoleh dari berbagai laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yaitu data PDRB Per Kapita Kabupaten Way Kanan dan data kesejahteraan masyarakat yaitu data IPM Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan data yang diperoleh di harapkan dapat diketahui bagaimana pengaruh variabel tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Dalam hal ini data yang diperoleh berasal dari laporan tahunan selama sepuluh tahun (2006-2015) yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.

a. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Way Kanan

Sejak berdirinya Kabupaten Way Kanan perekonomian daerah tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat di lihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) harga konstan dan PDRB harga berlaku yang terus meningkat setiap tahunnya. Di mana PDRB harga konstan dan PDRB harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan dalam volume produksi barang dan jasa yang di hasilkan di Kabupaten Way Kanan. PDRB atas dasar harga berlaku meningkat secara periodik. Dapat diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir PDRB Kabupaten way Kanan mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 PDRB Kabupaten Way Kanan atas dasar harga berlaku mencapai 10.05 triliun rupiah, naik sebesar 3,26 triliyun rupiah atau sekitar 48 persen dari tahun 2011, sedangkan pdrb atas dasar harga konstan tahun 2015 mencapai 7,83 triliyun rupiah, naik sebesar 23 persen dari tahun 2011.

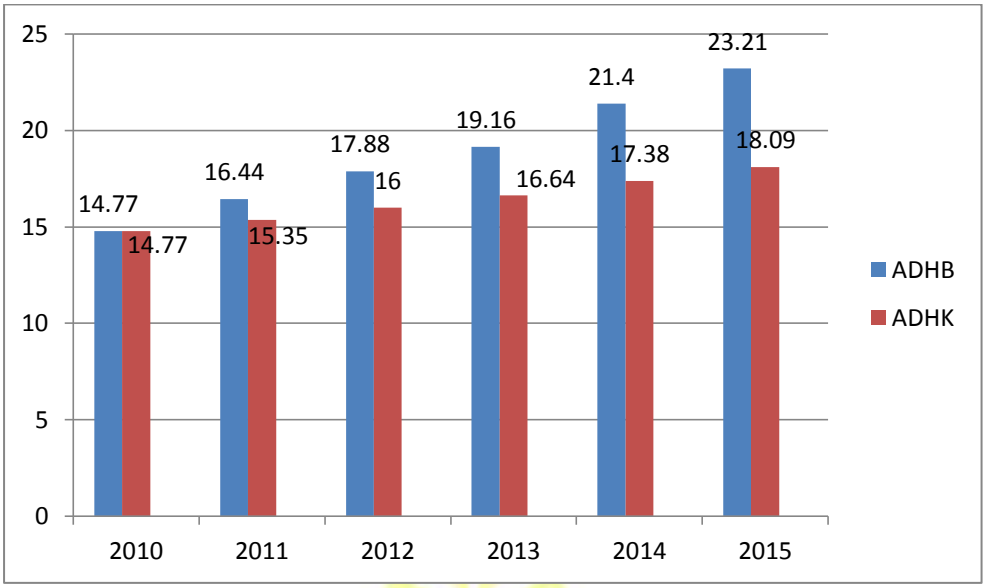

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan 2015

Gambar 4.1
PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 (Triliun Rupiah), 2011-2015

b. Struktur Ekonomi

Besarnya peran masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan total PDRB mencerminkan struktur perekonomian wilayah yang bersangkutan. Struktur perekonomian suatu daerah sangat di tentukan oleh besarnya sumbangan suatu lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan masing-masing lapangan usaha menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing lapangan usaha. Dengan demikian berdasarkan peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB dapat mencerminkan lapangan usaha mana yang memberikan

peranan terbesar dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Way Kanan.

Jadi selama periode tahun 2011-2015, perekonomian Kabupaten Way Kanan masih di dominasi oleh tiga sektor ekonomi yang utama yakni sector pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2015 memiliki peranan sebesar 37,35 persen terhadap total PDRB. Peranan terbesar kedua adalah industri pengolahan memberikan share sebesar 22,34 persen, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan peranan sebesar 9,35 persen terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu di bawah 5 persen. Kecuali untuk kategori kontruksi yang mencapai 7,65 persen. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Peranan PDRB Kabupaten Way Kanan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2015

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	39,59	39,97	38,86	38,08	37,78	37,35
2	Pertambangan Dan Penggalian	3,53	3,80	3,87	4,03	4,20	4,55
3	Industri Pengolahan	21,54	21,16	21,98	21,96	22,39	22,34
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Kontruksi	8,56	8,36	8,21	8,12	8,00	7,65

7	Perdagangan Besar Dan Eceran, Resparasi Mobildan Sepeda Motor	10,02	9.95	9,85	9,93	9,29	9,35
8	Transportasi Dan Perdagangan	2,04	2,01	2,07	2,16	2,23	2,47
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0,58	0,64	0,67	0,75	0,80	0,85
10	Informasi Dan Komunikasi	3,51	3,45	3,48	3,61	3,62	3,84
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	1,10	1,07	1,10	1,10	1,06	1,05
12	Real Estat	2,05	2,12	2,22	2,24	2,32	2,15
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	3,18	3,30	3,47	3,68	3,66
15	Jasa Pendidikan	2,57	2,71	2,80	2,96	3,01	3,04
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	0,88	0,88	0,91	0,93	0,95	0,99
17	Jasa Lainnya	0,55	0,54	0,51	0,50	0,50	0,55
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka sementara
**Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan2015

c. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Way Kanan pada tahun 2015 mengalami perlambatan dan merupakan pertumbuhan terendah dalam 5 tahun terakhir. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Way Kanan tidak terlepas dari melambatnya pertumbuahan ekonomi nasional maupun dunia internasional. Dimana PDRB nasional tahun 2015

hanya tumbuh 4,79 persen dari 5,02 persen di tahun 2014. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Way Kanan tahun 2015 mencapai 5,27 persen, sedangkan tahun 2014 tumbuh sebesar 5,65 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015 dicapai oleh transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan sebesar 11,70 persen. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 11,21 persen. Sedangkan pertumbuhan terndah terjadi pada pengadaan listrik dan gas yaitu hanya mencapai 1,35 persen pada tahun 2015.

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Way Kanan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2015

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	4,92	4,92	4,17	4,35	4,57	3,94
2	Pertambangan Dan Penggalian	14,67	14,67	7,70	9,49	7,07	8,68
3	Industri Pengolahan	0,66	0,66	5,69	5,82	5,81	7,56
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	4,99	4,99	8,34	9,65	6,92	1,35
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	2,88	2,88	2,55	1,11	5,29	2,52
6	Kontruksi	6,44	6,44	3,58	3,23	4,16	1,74
7	Perdagangan Besar Dan Eceran, Resparasi Mobildan Sepeda Motor	8,25	8,25	7,29	4,13	4,88	3,79
8	Transportasi Dan Perdagangan	10,39	10,39	12,43	10,35	7,03	11,70
9	Penyediaan Akomodasi Dan	13,81	13,81	9,02	10,21	10,53	11,21

	Makan Minum						
10	Informasi Dan Komunikasi	8,57	8,57	8,24	9,47	10,17	8,42
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	4,84	4,84	3,86	2,46	2,32	5,06
12	Real Estat	9,83	9,83	15,24	9,34	9,36	1,46
13	Jasa Perusahaan	13,27	13,27	12,97	8,73	5,69	6,99
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	3,21	5,50	4,53	8,95	5,32
15	Jasa Pendidikan	11,46	11,46	3,65	5,88	9,41	7,65
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	4,56	4,56	8,52	8,68	8,74	7,87
17	Jasa Lainnya	4,19	4,19	2,90	2,96	6,01	9,62
	Produk Domestik Regional Bruto	5,31	5,31	5,55	5,28	5,65	5,27

*Angka sementara
**Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan2015

d. PDRB Per Kapita

Tingkat kesejahteraan secara umum bisa ditunjukkan dari meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan perkapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Apabila PDRB suatu daerah di bagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB perkapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB perkapita atau persatu orang penduduk.

Tabel 4.4
PDRB Per Kapita Kabupaten Way Kanan dan Provinsi Lampung, 2011-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
Kabupaten Way Kanan	14,76	16,44	17,88	19,16	21,40	23,21
Provinsi Lampung	19,72	21,98	23,91	22,77	28,78	31,19

*Angka sementara
**Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan2015

Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat Kabupaten Way Kanan pada tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. Meskipun angka perkapita ini bersifat global tanpa melihat nilai tersebut benar-benar secara merata diterima oleh setiap individu di Kabupaten Way Kanan, namun dengan melihat perkembangannya dapat diketahui adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Way Kanan secara umum di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. PDRB perkapita Kabupaten Way Kanan tahun 2015 adalah sebesar 23,21 juta rupiah dengan pertumbuhan 41 persen dari tahun 2011. Sedangkan ditahun 2014 PDRB perkapita Kabupaten Way Kanan hanya sebesar 21,40 juta rupiah.

Peningkatan pendapatan perkapita di Kabupaten Way Kanan juga sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita Provinsi Lampung, meskipun nilai PDRB perkapita untuk Kabupaten Way Kanan lima tahun terakhir masih berada di bawah angka PDRB

perkapita Provinsi Lampung. Pada tahun 2015, PDRB perkapita Provinsi Lampung mencapai 31,19 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 42 persen dari tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2014 hanya sebesar 28,78 juta rupiah.

PDRB Perkapita Kabupaten Way Kanan dan Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2011-2015, pendapatan perkapita Kabupaten Way Kanan masih berada di bawah pendapatan perkapita Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa secara makro, rata-rata pendapatan penduduk Way Kanan masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung. Akan tetapi perlu diketahui bahwa indikator PDRB perkapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan perkapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk melihat apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Meskipun demikian, dengan segala keterbatasan indikator PDRB Perkapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro dan tolak ukur kemakmuran suatu daerah.

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah/provinsi dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha ekonomi suatu wilayah dalam satu periode. Unit ekonomi yang dimaksud mencakup kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Adapun data PDRB Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan indikator PDRB Per Kapita adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
PDRB
Periode 2006-2015

Tahun	PDRB Per Kapita Way Kanan
2006	4.268,23
2007	4.946,31
2008	5.531,37
2009	6.359,84
2010	14.765,33
2011	16.441,58
2012	17.881,72
2013	19.158,23
2014	21.404,20
2015	23.213,76

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan 2006-2015 (diolah)

Dari tabel 4 dapat di ketahui bagaimana pertumbuhan PDRB di Kabupaten Way Kanan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terlihat pada tahun 2006 sebesar 4.268,23 menjadi 23.213,76 pada tahun 2015. Dalam hal ini terjadi peningkatan atas produksi barang dan jasa pada setiap tahunnya. Sehingga PDRB dapat

mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan karena setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

f. Kesejahteraan Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang penggunaannya dapat diterima di seluruh dunia. Dalam penelitian ini digunakan IPM sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk satu satuan indeks kesejahteraan. Adapun data mengenai tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang diperoleh dari indikator kesejahteraan masyarakat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Periode 2006-2015

Tahun	IPM Way Kanan
2006	68.08
2007	68.46
2008	68.98
2009	69.46
2010	69.92
2011	70.43
2012	70.84
2013	71.08
2014	71.08
2015	71.08

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan 2006-2015 (diolah)

Dari tabel 5 dapat diketahui nilai IPM Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar 68.08 persen dan hingga 71.08 persen di tahun 2015.

2. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan pengujian normalitas dengan uji *Jarque Berra* atau *J-B test.* Jika nilai J – B hitung > J – B tabel, atau nilai probability Obs[8]R Square lebih besar dari taraf nyata 5 persen, maka di nyatakan bahwa residual U_t didistribusi normal dan ditolak sebaliknya.

Tabel 4.7
Uji Normalitas

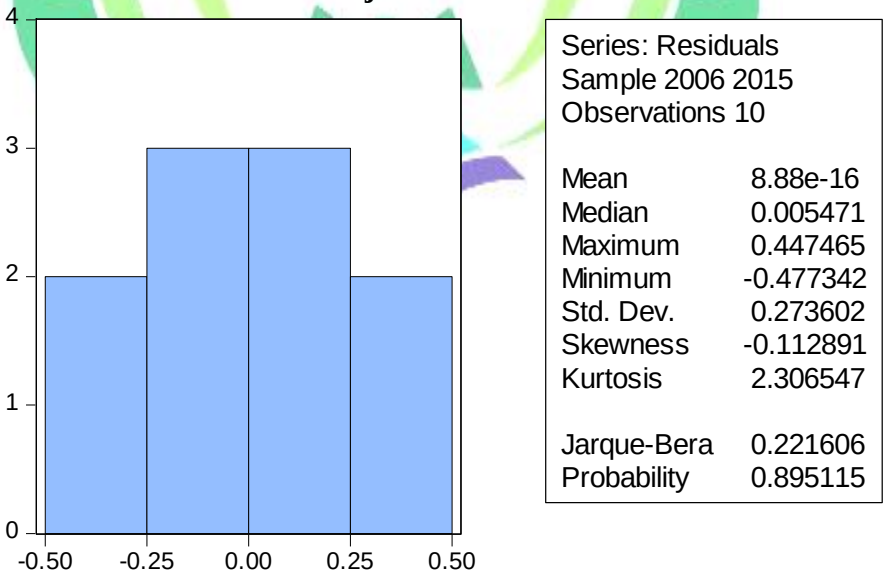

Sumber: E-views diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan analisis J-B test maka sebaran data residual pada model regresi berdistribusi normal, di mana nilai hitung

J-B test sebesar 1.355170 dan probability sebesar 0.507842 yang artinya lebih besar 0,05.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka yang pertama akan dianalisis adalah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat tahun 2010-2015 Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Way Kanan dengan analisis Regresi Linier Sederhana. Untuk memudahkan perhitungan model analisis tersebut digunakan program *E-views for Windows (9).* Berikut merupakan hasil analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/07/17 Time: 13:38
Sample: 2006 2015
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.61373	1.339551	40.77017	0.0000
X	1.644119	0.143353	11.46903	0.0000

R-squared	0.942668	Mean dependent var	69.94100
Adjusted R-squared	0.935502	S.D. dependent var	1.142672
S.E. of regression	0.290199	Akaike info criterion	0.540354
Sum squared resid	0.673722	Schwarz criterion	0.600871
Log likelihood	-0.701771	Hannan-Quinn criter.	0.473967
F-statistic	131.5387	Durbin-Watson stat	1.932600
Prob(F-statistic)	0.000003		

Sumber: E-views diolah tahun 2017

Hasil uji regresi linier sederhana pada tabel di atas menunjukkan persamaan regresi dengan PDRB (independen) dan kesejahteraan

masyarakat (IPM). Koefesien regresi sebesar 1.644119 bertanda positif, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% tingkat PDRB maka kesejahteraan masyarakat mengalami kenaikan sebesar 1.644119 atau 1.64%. Koefesien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara PDRB dan Kesejahteraan Masyarakat, yakni semakin besar PDRB yang dilakukan maka akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun persamaan regresi berdasarkan tabel di atas adalah:

$$Y = 54.61337 – 1.644119X + e$$

b. Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat Kesejahteraan Masyarakat. Pengujian ini dilihat dari masing-masing t-statistik dari regresi dengan t-tabel dalam menolak dan menerima hipotesis. Dari hasil uji persamaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9
Nilai t-statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.61373	1.339551	40.77017	0.0000
X	1.644119	0.143353	11.46903	0.0000

R-squared	0.942668	Mean dependent var	69.94100
Adjusted R-squared	0.935502	S.D. dependent var	1.142672
S.E. of regression	0.290199	Akaike info criterion	0.540354
Sum squared resid	0.673722	Schwarz criterion	0.600871
Log likelihood	-0.701771	Hannan-Quinn criter.	0.473967
F-statistic	131.5387	Durbin-Watson stat	1.932600
Prob(F-statistic)	0.000003		

Sumber: E-views diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil output E-views pada tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai t-statistik lebih besar dari pada nilai t-tabel (11.46903 > 1.895) dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,00003 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel PDRB memiliki Pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

c. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi (R^2) suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh PDRB terhadap Kesejateraan Masyarakat dan sebaliknya. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi dengan menggunakan E-views sebagai berikut:

Tabel 4.10
Nilai R^2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.61373	1.339551	40.77017	0.0000
X	1.644119	0.143353	11.46903	0.0000

R-squared	0.942668	Mean dependent var	69.94100
Adjusted R-squared	0.935502	S.D. dependent var	1.142672
S.E. of regression	0.290199	Akaike info criterion	0.540354

Sumber: E-views diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil output E-views di atas diperoleh nilai korelasi/hubungan nilai R-squared sebesar 0.942668 maka semakin

bagus model tersebut. Hal ini berarti bahwa 94,26 persen tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten way kanan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB. Sedangkan sisanya sebesar 6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam variabel penelitian.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Produk Domestik Regional Bruto dilihat sebagai salah satu faktor terpenting untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi disuatu wilayah. PDRB sebagai nilai total pendapatan diberbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, industri, listrik, perdagangan, pengangkutan, bank dan jasa memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Apabila pendapatan secara perkapita yang dihasilkan oleh Kabupaten Way Kanan meningkat secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan keterangan dan perumusan hipotesis yang telah dipaparkan, maka diperoleh hasil melalui uji statistik yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat. PDRB menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas 0,00000 dan berhubugan positif dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar

(0,942668), yang berarti bahwa apabila PDRB naik sebesar 1 persen, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan naik sebesar 0,942668 persen. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Semakin tinggi nilai PDRB di Kabupaten Way Kanan maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat dan begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah PDRB maka akan semakin rendah tingkat kesejahteraan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Pembangunan manusia berdampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, karena peningkatan pembangunan manusia akan menghasilkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada masa yang akan datang.

Salah satu indikator yang populer untuk mengukur kinerja pembangunan manusia atau kesejahteraan adalah HDI (*Human Development Index*) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia (IPM) mengambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan yang dianggap cukup representativ dalam perencanaan pembangunan bagi pemerintah. Perbaikan akses terhadap

konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi dimulai dari kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Tenaga kerja yang berpendidikan, berwawasan, memiliki keterampilan yang bagus, sehat secara jasmani dan rohani akan lebih kuat dan mampu berinovasi dan berdaya saing dalam dunia kerja sehingga produktivitas meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Way Kanan. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia yang secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia, artinya IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia tersebut dikomulasikan dari indikator-indikator yaitu Pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf (*literacy rate*). Kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka harapan hidup (*life expectancy*). Ekonomi, pendapatan rata-rata per kepala (*income per capita*).

Dalam konteks saat ini, di mana kehidupan penuh dengan persaingan, maka pendidikan menjadi unsur utama untuk meraih kehidupan yang layak. Tanpa pendidikan sulit untuk dapat bersaing dan merasakan hidup yang layak. Oleh karena itu perbaikan kualitas pembangunan manusia akan sulit terwujud jika tidak di awali dari pendidikan karena proses pendidikan sangat menentukan kualitas yang diharapkan.

2. Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu prinsip yang penting dalam sistem ekonomi Islam adalah negara memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat. Negara bertanggungjawab secara langsung dalam memelihara masyarakatnya dan menyediakan berbagai sarana untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Lahirnya otonomi daerah menumbuhkan harapan baru bagi pemerintah serta masyarakat untuk membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki suatu daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui perannya dalam pembangunan perekonomian dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu priode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Keadilan distribusi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun masyarakat pula berkewajiban untuk mewujudkannya.

Dengan menyadari bahwa setiap individu membutuhkan individu lainnya, sehingga manusia menjadi makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus memutuskan secara adil siapa yang berhak mendapatkan barang dan jasa, serta dengan cara bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan *maslahah*, sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan.

Kesadaran akan pentingnya maslahah akan medorong setiap individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan ajaran syar'i dan berusaha mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai *falah*. Jika setiap individu di Indonesia telah sadar akan arti pentingnya maslahah maka akan terwujud masyarakat yang menyadari akan peran pentingnya dalam menciptakan keadilan distribusi dengan mempersempit kesenjangan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan menunaikan kewajiban zakat, mewakafkan sebagian harta yang dimiliki, mengaktifkan hukum waris, berinfak serta bersedekah.

Zakat, wakaf, waris, infak dan sedekah yang bersumber dari masyarakat, secara langsung menghilangkan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah. Terutama dalam menyediakan dana yang murah bagi pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, penyediaan fasilitas publik, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menjelma menjadi satu mekanisme jaminan sosial secara utuh.

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat

merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintah yang adil.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer (*daruri*), sekunder (*the need/haji*), maupun tersier (*the commendable/tahsini*) dan pelengkap (*the luxury/kamili*). Disebabkan hal tersebut pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'ah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Ekonomi syari'ah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat.

Menurut Baqir ash-Sadr pemilikan negara mendominasi sistem ekonomi Islam yang pada akhirnya akan mendorong lahirnya sebuah gagasan bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi sangatlah penting. Dalam hal ini, beberapa fungsi pokok pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain mengatur sistem distribusi kekayaan berdasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja masing-masing individu dalam masyarakat, mengintegrasikan aturan hukum Islam dalam setiap penggunaan dan

pengelolaan sumber daya alam, dan membangun sistem kesejahteraan masyarakat melalui terjaminnya keseimbangan sosial dalam masyarakat.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia : hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas. Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Dalam islam juga pendidikan, kesehatan, menjadi tanggung jawab Negara untuk menanganinya, dan termasuk kategori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh Negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat.

a. Pendidikan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda “mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim” (HR. Thabrani). Mencari ilmu adalah kewajiban yang harus dipikul oleh setiap individu (fardhu ‘ain). Ilmu-ilmu lain yang bersifat fardhu kifayah (fardu atas sebagian kaum muslim) tidak akan gugur kewajiban mencarinya sebelum sebagian kaum muslim berhasil melaksanakannya dalam batas yang mencukupi.misalnya, ilmu ekonomi, kedokteran, industry, elektronika, mekanika, dan ilmu-ilmu lain yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan dalam kehidupan kaum muslim.
b. Kesehatan adapun yang berhubungan dengan jaminan kesehatan, juga salah satu kebutuhan pokok yang mendapat perhatian besar oleh islam. Karena jika pemenuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi dengan

mudah, maka hal ini akan berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu kesehatan merupakan indikator kesejahteraan suatu negeri. Pada masa lalu, daulat islamiah telah menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Negara menjamin kesehatan masyarakat, mengatasi dan mengobati orang-orang sakit, serta mendirikan tempat-tempat pengobatan. Rasulullah SAW pernah membangun suatu tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiayainya dengan harta benda *baitulmal*. Jadi keberadaan dokter ditengah masyarakat, terpecahnya problem kesehatan masyarakat, dan pembangunan sarana atau balai-balai kesehatan merupakan tugas-tugas yang dibebankan Islam terhadap Negara.

c. Standar hidup layak (daya beli) dalam hal ini Negara akan diminta pertanggung jawaban terhadap rakyat yang menjadi tanggungannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok individu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara sempurna baik karena mereka telah berusaha tapi tidak cukup (fakir dan miskin), maupun terhadap orang-orang yang lemah dan cacat yang tidak mampu untuk bekerja, maka negara harus menempuh berbagai cara untuk memnuhi kebutuhan hidup mereka. Negara dapat saja memberikan nafkah baitul mal tersebut berasal dari harta zakat yang merupakan kewajiban dan diambil oleh Negara dari orang-orang kaya, sebagaimana firman Allah SWT:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dengan demikian, islam memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga masyarakat, berupa pangan, sandang dan papan. Demikianlah Negara harus berbuat sekuat tenaga dengan kemampuannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memungkinkan dinikmati oleh setiap individu yang tidak mampu meraih kemaslahatan itu.

Konsep IPM dalam Agama Islam sudah mulai diterapkan mulai masa perjuangan Nabi Muhammad yakni tahun 611-632 Masehi. Paling tidak ada tiga faktor yang dijadikan tolak ukur oleh UNDP akan keberhasilan suatu pembangunan yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga unsur ini pun mendapat perhatian yang cukup besar dalam Islam sebagai faktor penting dalam pembangunan manusia itu sendiri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa di antara kamu bangun di pagi hari dengan perasaan aman, sehat tubuhnya dan cukup persediaan makanan pokoknya untuk hari itu, seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia.” (H.R. Tirmidzi)

Namun bagi Islam, faktor manusia lah yang lebih berperan dalam sebuah pembangunan. Tentu saja yang dimaksud oleh Islam adalah manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, manusia yang bebas dan merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih. Semua hal ini dapat dicapai tentu saja melalui tarbiyah insaniyah itu sendiri. Pendidikan yang menyeluruh dan bukan sebagian saja.

Upaya pembangunan manusia itu dapat dimulai dengan peningkatan kemampuan melalui pendidikan. Ilmu pengetahuan dan Islam dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan suluh penerang kehidupan sekaligus nafas peradaban. Demikian pula dengan kesehatan. Hanya manusia yang sehat jasmani yang mampu memberikan kemampuan terbaiknya untuk pembangunan. Islam sangat memperhatikan kesehatan dalam semua aspek kehidupan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel PDRB terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan. berdasarkan uraian hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten Way Kanan hal ini di tandai dengan nilai probabilitas (0,0000). Dengan nilai koefisien positif (1.644119) yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen pada PDRB, maka kesejahteraan akan meningkat sebesar 1,644119 persen dengan asumsi variabel lain tetap, atau ringkasnya apabila PDRB meningkat maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
2. Dalam ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan (falah) adalah sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan. Karena kesejahteraan yang berarti selamat sentosa, aman dan damai merupakan misi kerasulan nabi Muhammad SAW. Dalam islam juga IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak menjadi tanggung jawab Negara untuk menanganinya, dan termasuk kategori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh Negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Way Kanan di pengaruhi secara positif dan signifikan oleh PDRB yang bertambah setiap tahunnya. Dengan kata lain kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta memiliki pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan seseorang. Dari penjelasan di atas kabupaten Way Kanan dalam perekonomian peran pemerintah sangat diperlukan bertujuan untuk pengaturan antara pendapatan dan pengeluaran yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri maka pemerintah Kabupaten Way Kanan harus dapat lebih mengelola sumber daya dan sumber pembiayaan yang diperoleh dari PDRB Kabupaten Way Kanan guna lebih produktif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi agar menjadi lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah di dapat penulis. Maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu:

1. Dilihat dari variabel tersebut, nilai yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah variabel PDRB. Karena sumber daya alam maupun sumber daya manusianya harus di gunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan ekonomi wilayah, sehingga dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya sebuah upaya yang dilakukan

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dikalangan masyarakat sehingga terciptalah suatu masyarakat yang sejahtera.

2. Bagi akademisi, dengan adaya hasil penelitian ini di harapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dengan memilih atau menambah data atau variabel lain sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badrudin, Rudy, 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010, Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2015.

Bappeda.lampungprov.go.id. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2012, di akses pada 22 November 2015.

Bappeda.lampungprov.go.id. h. 31. Di Akses 10 Mei 2016

Badan Perencanaan 2011, Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, *Analisis Statistik Perencanaan Pembangunan*, Way Kanan, Lampung.

Batafor, Gregorius, *2009, Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata – Provinsi NTT*, Tesis Pascasarjana Universitas Udayana.

Bintarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

BPS.go.id. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung 2016*.

BPS.go.id.

Brata, Aloysius Gunadi, 2004, *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan,* Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.

Buku Kerja Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana, 1995, Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung.

Chalid, Nursiah dan Yusbar Yusuf, 2014, *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*, Jurnal Ekonomi Universitas Riau.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2011, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet.* Ke-10, Jakarta: Darus Sunnah

Elkana Goro Leb, 2013, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Sabu RaiJua Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL Universitas Nusa Cendana.

Farida, Ai Siti, 2011, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.

Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Cetakan ke VII, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hadi, Sutrisno, 2002, *Metode Research*, Yogyakarta: ANDI.

Hapsari, Tunjung , *2011, Pengaruh Insfrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Skripsi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasan, Iqbal, 2008, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta : Bumi Aksara.

Hendarmin, 2012, *Pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota provinsi Kalimantan barat*, Jurnal ISSN 1693-9093 Volume 8, Nomor 3, Oktober.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka.

Karim, A. Adiwarman, 2012, *Ekonomi Mikro Islami*, Cet. 5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajat, 2010, *Masalah Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.

M. Umar Chapra, 2000, *Thowards A Just Monetary System*, Ahli Bahasa Ikhwan Abidin Basri, Sistem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press.

Midgley, James, 1995, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, London : SAGE Publications Ltd.

Mirza, Denni Sulistio, 2011, *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap IPM Jawa Tengah* (Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Nasution, Mustafa Edwin, et.al. 2007, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana.

Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2009, Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press.

Qardhawi, Yusuf , Dlam Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2000, *Pengenalan Ekskutif Ekonomi Islam,* Jakarta: Kencana.

Qardawi, Yusuf, 2000, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar.

Saim, Peter dan Yeni Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.

Saputra, Whisnu Adhi, 2011, *Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, Penganguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah*, Skripsi untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro Semarang.

Sari, Devani Ariestha, 2016, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung*, Skripsi Ekonomi Pembangunan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Sasana, Hadi, 2009, *Peran Disentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No. 1, Juni.

Singgih, Santoso, *2004, Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS*, Jakarta: Gramedia.

Sodiq, Amirus, 2015, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, Equilibrium, Vol. 3, No. 2*, Desember.

Subagyo, Joko, *2011, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sub Direktorat Analisis Statistik, 2008, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Sugiono, 2001, *Penelitian Administratif*, Bandung, Alfabeta.

Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna, 2015, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukmaraga, Prima, 2011, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro Semarang.

Sulaksono, Agus, *Pengaruh Produksi Batubara Terhadap Ekonomi Dan Kesejahteraan*, Jurnal.

Sulistiawati, Rini, 2012, "*Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia*" Jurnal EKSOS ISSN 1693-9093 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Vol. 8 No.3.

Sumodiningrat, Gunawan, *1998*, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: IDEA.

Supranto, J., 1981, *Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan*, Jakarta: PT Gramedia.

Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan*, Jakarta : Salemba Empat.

Suryono, Agus Wiratno, 2010, "*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah*" Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Suryono, Agus, *2014, Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi ISSN 2085-1162 Volume VI, Nomor 02, September.

Syahrullah, Dio, *2014, Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten tahun 2009-2012*, Skripsi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tarigan, Robinson, 2014, *Ekonomi Regional*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Taslim, Arifin, 2004, *Metode Kesejahteraan Masyarakat*, IPB, Bogor.

Tika, Pabundu Moh., 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tjiptoherijanto, Prijono, *2002, Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Todaro, Michael P, *2006, Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi 9*, Jakarta: Erlangga.

United Nations Development Programme, 1990, *Human Development Report 1990*, Jakarta: BPS.

W.J.S. Poerwadarimta, 1996, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, Bandung: Mizan.

Zariah, Nurul, 2007, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara.